

ABSTRAK

- (A) Nama Mahasiswa : Ardyanus Hartony Laos
(B) NIM : 207192001
(C) Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS PT BFI)
(D) Halaman : x + 213 halaman, 2021
(E) Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pinjaman Online.
(F) Isi Abstrak :

Dalam layanan aplikasi pinjaman online, (*Fintech*) banyak orang yang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya seperti yang terjadi pada kasus antara PT BFI dan Korban Ibrahim. Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online, dan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Tujuan dari pada penelitian tesis ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam layanan aplikasi pinjaman online. Metode yang akan di gunakan didalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian dan normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan di atur juga dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang di tegaskan pada Pasal 26 bahwa: "Pihak penyelenggara bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan." Dalam pasal 7 Jo pasal 8 Bagi penyelenggara/ pelaku usaha pinjaman online yang menyediakan jasa keuangan harus terdaftar atau mempunyai izin dari Otoritas jasa keuangan (OJK).

Sanksi terhadap penyelenggara/pelaku usaha yang tidak mempunyai izin dan melakukan penyalahgunaan data pribadi dari konsumen/debitur, ditur dalam ketentuan pasal 47 ayat 1 yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

ABSTRACT

- (A) *Student Name* : Ardyanus Hartony Laos
(B) *ID* : 207192001
(C) *Thesis Title* : *LEGAL PROTECTION OF BORROWER'S PERSONAL DATA IN ONLINE LOAN APPLICATION SERVICES (CASE STUDY OF PT BFI)*
(D) *Page* : x + 213 page, 2021
(E) *Keywords* : *Legal Protection, Personal Data, Online Loans.*
(F) *Abstract Contents* :

In online loan application services, (Fintech) many people have complained about problems regarding the dissemination of personal data carried out by online loan providers without notification and without permission from the owner, as happened in the case between PT BFI and Victim Ibrahim. In this regard, it is important to study the legal protection of borrowers' personal data in online loan application services, and sanctions for personal data violations. The purpose of this thesis research is to examine the legal protection of the personal data of borrowers for online loan application services. The method that will be used in writing this thesis is a research and normative method with an approach to legislation and a fact approach. The results of the study show that legal protection and sanctions for personal data violations have been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and also regulated in the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. . 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services, which is emphasized in Article 26 that: "The organizers are responsible for maintaining the confidentiality, integrity and availability of users' personal data and in their use must obtain approval from the owner of personal data unless otherwise specified by the provisions of laws and regulations.

Sanctions against operators/business actors who do not have permits and abuse personal data from consumers/debtors are regulated in the provisions of Article 47 paragraph 1, namely administrative sanctions in the form of written warnings, fines, obligation to pay a certain amount of money, restrictions on business activities and revocation of license .